

Analisis Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi

Dito Wijaya; Haryadi; Zulgani

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstract.

This study aimed to quantify the fiscal needs in the city Jambi and analyze the relationship between the level of fiscal dependency of between the level of fiscal dependency of economic growth in the city of Jambi and see how big the city's fiscal dependence on the central govermeny Jambi. The results of this study indicate that the Fiscal Needs in Jambi has increased significantly each year, with an average growth of 27 times greater where the level of dependence of the Local Government Fiscal Jambi city against the central government is still very High, on average within 6 year (2008 to 2013) obtained the proportion of revenue to the level of fiscal decentralization Jambi each including a small category with an average of 10.93%. This suggests that the fiscal capacity of the city of Jambi to implement regional autonomy means that the dependency ratio is the small city of Jambi to the central government is very high at 89.07 to the relationship between the Fiscal Dependence Levels of Economic Growth in Jambi indicates perfect correlation and positive direction. .

Keywords: Fiscal Needs , Economic Growth , the level of fiscal dependency

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah memberi kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan memajukan daerahnya, sehingga inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi daerah sekarang adalah kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menimbulkan harapan yang besar terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Kota Jambi memiliki luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi akan tetapi di Kota Jambi memiliki jumlah Penduduk yang relatif tinggi dibandingkan Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah yang relatif kecil dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi tersebut telah mencerminkan tingkat kebutuhan fiskal yang tinggi.

Jumlah penduduk yang besar memerlukan fasilitas-fasilitas umum yang lebih banyak yang tentunya mencerminkan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi dan pada akhirnya tentu saja menyebabkan besarnya tingkat kebutuhan fiskal yang harus dipenuhi di Kota Jambi. Atas kondisi ini diharapkan kapasitas fiskal di Kota Jambi dapat memenuhi semua kebutuhan fiskal di Kota Jambi yang dihasilkan dari PAD dan dana bagi hasil dari pusat, dalam hal ini diharapkan proporsi PAD dalam

memenuhi kebutuhan fiskal di Kota Jambi bisa lebih tinggi yang dapat mencerminkan kemandirian fiskal di Kota Jambi.

Jika dilihat dari struktur anggaran pendapatan belanja daerah Kota Jambi selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukkan proforsi belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi lebih banyak membiayai belanja pegawai dari pada untuk belanja pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis derajat desentralisasi Fiskal Kota Jambi; 2) menganalisis kebutuhan fiskal Kota Jambi; 3). Menganalisis hubungan tingkat ketergantungan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi .

METODE PENELITIAN

Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* selama kurun waktu tahun anggaran 2008 - 2013 yang terdiri dari Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Data tersebut dihimpun atau diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.

Analisis Data

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Perhitungan ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, atau dengan formula :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Dimana :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal sebagai berikut :

1. Nilai rasio antara 0,00 % - 10,00 % dikategorikan kriteria sangat kecil
2. Nilai rasio antara 10,01 % - 40,00 % dikategorikan kriteria kecil
3. Nilai rasio antara 40,01 % - 60,00 % dikategorikan kriteria cukup
4. Nilai rasio antara 60,01 % - 80,00 % dikategorikan kriteria besar
5. Nilai rasio antara 80,01 % - 100,00 % dikategorikan kriteria sangat besar

Analisis Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal merupakan anggaran yang dibutuhkan oleh suatu daerah untuk memenuhi total kebutuhan pengeluaran pembangunan suatu daerah. Secara konseptual total pengeluaran rata-rata daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, besarnya wilayah, jumlah penduduk miskin dan perkembangan harga.

Untuk menjawab permasalahan yang pertama dari penelitian ini yaitu bagaimana kebutuhan fiskal di Kota Jambi tahun 2008 – 2013, Secara formula dirumuskan sebagai berikut :

$$KbF = TPR (\beta_1IP + \beta_2IW + \beta_3IKR + \beta_4IH)$$

Dimana :

KF = kebutuhan fiskal

TPR = total pengeluaran rata-rata dalam APBD

IP = indeks variable penduduk

IW = indeks variable luaswilayah

IKR = indeks variable kemiskinan relative

IH = indeks harga

β_i = bobot variable

Bobot β_i ditentukan dengan menggunakan pertimbangan proporsional dan uji statistic sederhana. Adapun bobot masing-masing $\beta_1 = 0,4$; $\beta_2 = 0,1$; $\beta_3 = 0,1$; $\beta_4 = 0,4$. Kemudian metode menghitung indeks penduduk, wilayah dan indeks harga dijelaskan dalam formula berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah penduduk Kota Jambi}}{\text{Rata-rata jumlah penduduk nasional}}$$

$$IW = \frac{\text{Luas Wilayah Kota Jambi}}{\text{Rata-rata luas wilayah nasional}}$$

$$IKR = \frac{\text{Penduduk miskin Kota Jambi}}{\text{Jumlah penduduk Kota Jambi}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jambi

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi Kota Jambi untuk tahun 2008 – 2013 dapat dilihat pada tabel 1. berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jambi Tahun 2008-2013

| TAHUN | PAD | TOTAL PENDAPATAN DAERAH | DDF |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 2008 | 54.086.831.630 | 593.051.896.965 | 9,12 |
| 2009 | 55.671.281.870 | 608.555.058.533 | 9,15 |
| 2010 | 70.842.049.481 | 692.168.599.886 | 10,23 |
| 2011 | 98.999.978.722 | 869.966.667.732 | 11,38 |
| 2012 | 113.090.049.195 | 1.083.917.282.197 | 10,43 |
| 2013 | 132.910.979.710 | 1.164.352.549.296 | 11,42 |
| Rata-rata | | | 10,29 |

Sumber : data diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Jambi masing-masing termasuk kategori kecil dengan rata-rata sebesar 10,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kota Jambi melaksanakan otonomi daerah rasionya kecil yang berarti ketergantungan Kota Jambi terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi yaitu sebesar 89,07. Kota Jambi harus berusaha untuk terus meningkatkan PAD melalui penggalan potensi-potensi baru dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada.

Jika di lihat dari angka derajat desentralisasi fiskal per tahun dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 Kota Jambi berada pada angka 9,12 dan 9,15 yang berarti bahwa ketergantungan Kota Jambi terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi yaitu 90,88 pada tahun 2008 dan 90,85 pada tahun 2009. Demikian juga untuk tahun 2010 hingga tahun 2013 DDF Kota Jambi berkisar antara 10,23 hingga 11,42 yang menunjukkan bahwa selama periode tersebut tingkat ketergantungan Kota Jambi terhadap Pemerintah Pusat mencapai kisaran 89,77 dan 88,58.

Dengan Derajat Desentralisasi Fiskal yang dimiliki Kota Jambi pada posisi tersebut karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain karena Kota Jambi memiliki penduduk yang lebih padat, belum optimalnya pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang sebenarnya, masih terbatasnya pegawai dengan kualitas ketrampilan dan keahlian serta sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai.

Derajat desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pengertian Derajat Desentralisasi Fiskal daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat menjelaskan kemampuan keuangan daerah dengan melihat kapasitas PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) yang tercermin dalam struktur APBD.

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh peranan PAD dalam membiayai seluruh kegiatan di daerah, namun menurut hasil penelitian hampir semua daerah Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki PAD yang belum mampu membiayai seluruh pengeluaran daerah. Dari angka yang diperoleh dari perhitungan penelitian ini dapat menerangkan sejauh mana PAD Kota Jambi mampu memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah setiap tahun berdasarkan sumber-sumber keuangan aslinya.

Dari uraian diatas, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal-hal tersebut antara lain dengan menghitung potensi pajak dan retribusi yang sesungguhnya dan perlu melaporkan hasil pengumpulan Pendapatan Asli Daerah secara teratur, perlu dimonitor dan dibandingkan dengan target dan potensi dan harus segera dibuat kebijakan agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu Pemerintah Daerah Kota Jambi perlu juga mengambil langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
 - b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah oleh aparatur.
 - d. Membentuk tim satuan tugas pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan dilapangan oleh petugas.
 - e. Menyusun rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara cermat dan rasional sesuai dengan potensi yang ada, diupayakan agar target dibuat minimal sama dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.
 - f. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.
 - g. Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
2. Ekstensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut :
- a. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
 - b. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah yang diajukan perubahan.
 - c. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapatkan informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada : (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat yang harus seminimal mungkin. Oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Kebutuhan Fiskal Kota Jambi

Kebutuhan fiskal adalah anggaran yang dibutuhkan oleh daerah bersangkutan apakah itu Provinsi atau kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam mencapai kesejahteraan. Komponen-komponen yang mempengaruhi kebutuhan fiskal suatu daerah adalah terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto perkapita.

Agar pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kegiatan pembangunan diperlukan dana adapun sumber-sumber pendapatan untuk memperoleh dana dimaksud ada beberapa sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan mengurangi ketimpangan sumber

pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah, ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dana Alokasi Umum bertujuan melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya Kesenjangan Fiskal daerah, yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Dana Alokasi Umum bagi daerah yang Kapasitas Fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang kapasitas fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Secara implisit prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Komponen-komponen yang mempengaruhi fiskal suatu daerah adalah terdiri dari jumlah penduduk, luas daerah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto perkapita. Untuk menghitung beberapa kebutuhan fiskal Kota Jambi selama 2008-2013 dengan dapat melihat Tabel 2:

Tabel 2. Kebutuhan Fiskal Kota Jambi Tahun 2008 - 2013

| TAHUN | Standar Kebutuhan Fiskal Provinsi Jambi | Kebutuhan Fiskal Kota Jambi (kali) |
|------------------|--|---|
| 2008 | 45.808,23 | 25 |
| 2009 | 49.078,87 | 23 |
| 2010 | 43.749,35 | 29 |
| 2011 | 50.196,29 | 31 |
| 2012 | 71.713,24 | 26 |
| 2013 | 78.108,64 | 26 |
| Rata-rata | | 27 |

Sumber : data diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kebutuhan Fiskal Kota Jambi selama periode tahun 2008 – 2013 mengalami perkembangan angka yang cukup fluktuatif berkisar pada angka 23 sampai dengan 31 dengan rata-rata 27. Angka ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut Kebutuhan Fiskal Kota Jambi sebesar 27 kali lebih besar dari rata-rata standar kebutuhan fiskal Provinsi Jambi.

Jika dilihat dari angka kebutuhan fiskal per tahun di Kota Jambi, pada tahun 2008 menunjukkan angka 25 kali berarti pada tahun 2008 kebutuhan fiskal Kota Jambi 25 kali lebih besar dari rata-rata standar kebutuhan fiskal Provinsi Jambi. Walau pada tahun 2009 terjadi penurunan sedikit menjadi 23 kali namun pada tahun 2010 kebutuhan fiskal Kota Jambi kembali meningkat sebesar 29 kali lebih besar dari rata-rata standar kebutuhan fiskal Provinsi Jambi.

Demikian juga pada tahun 2011 kebutuhan fiskal Kota Jambi menunjukkan angka yang paling besar selama 6 (enam) tahun periode penelitian yaitu sebesar 31 kali yang berarti 31 lebih besar dari rata-rata standar kebutuhan fiskal Provinsi Jambi. Untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka kebutuhan yang sama yaitu sebesar 26 kali yang berarti 26 lebih besar dari rata-rata standar

kebutuhan fiskal Provinsi Jambi. Kota Jambi masih memiliki tingkat kebutuhan fiskal yang cukup tinggi dibanding dengan Provinsi Jambi, dimana Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang cukup pesat disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dituntut untuk tetap secara optimal melaksanakan dan memenuhi fungsi layanan dasar umum, antara lain penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, kebutuhan fiskal diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemalahan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita dan indeks pembangunan manusia yang tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup tinggi.

Jumlah penduduk merupakan variabel lain yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik setiap daerah, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah, indeks kemalahan konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemalahan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah. PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi bruto dalam suatu wilayah, indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jambi selama kurun waktu 2008-2013 termasuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut Kota Jambi belum optimal menggali sumber-sumber potensi penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada.
2. Kebutuhan Fiskal di Kota Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, rata-rata pertumbuhannya sebesar 27 kali lebih besar dari rata-rata standar kebutuhan fiskal Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi telah melaksanakan pembangunan daerah secara lebih optimal untuk memenuhi fungsi layanan dasar umum bagi masyarakat.

Saran

1. Diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat menjaga stabilitas ekonomi dan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat hal ini merupakan faktor penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal di Kota Jambi.
2. Terus berupaya meningkatkan penerimaan anggaran melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, menggunakan anggaran secara efisien, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat.
3. Agar Pemerintah Kota Jambi tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dengan pemerataan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berkualitas menuju kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Fathillah, G. (2001). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kutai,Kalimantan Timur*, Program Pascasarjana Intitute Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*.Jogjakarta :UPP AMP YKPN.
- Junaidi, J. (2014). *Statistik Deskriptif dengan Microsoft Office Excel*. Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Mamesah,D.J. (1995). *Sistem Administarsi Keuangan Daerah*.PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. (2001). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001*.Makalah Seminar, MEP-UGM, Yogyakarta. Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nanga, Muana. (1991). *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Suatu studi kasus di Kabupaten Malang, Probolinggo dan Trenggalek Propinsi Jawa Timur*, Tesis S-2, PPS-UGM, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Damarsari, R., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2015). *Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 161-172.
- Nurlan. (2006). *P engelolaan Keuangan Daerah*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Sanusi, A. 2002, *Evaluasi Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi* (Tesis S-2 Tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Suprajitno, P. (2003). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah studi kasus di Kabupaten Banjarnegara*. Program Pascasarjana Intitute Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tan, Samsurizal. (2014), *Perencanaan Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi
- Walangare, LW. (2006). *Keuangan Negara Dasar*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor